



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 1991  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 1991**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN 1991 SERI D NO.SERI.8

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 3 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah - Tingkat II diperlukan adanya pengelolaan potensi Daerah secara mantap dibidang peternakan pada Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan pengelolaan potensi Daerah sebagai salah satu usaha untuk - meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sub sektor Peternakan, perlu ditetapkan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut diatas perlu diadakan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten - Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah-Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi Propinsi Jo Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun-1968 tentang Perubahan sebutan Kehewanan menjadi Peternakan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pengerahan Urusan Peternakan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun -1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi - Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Dalam Bidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Peternakan : adalah Dinas Peternakan Kabupaten - Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Peternakan Ka - bupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Peternakan Kabu - paten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- g. Unit Pelaksana : adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

## B A B II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan - Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan Daerah.

- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedangkan dalam bidang Administrasi dibawah koordinasi sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok

##### Pasal 4

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Peternakan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah kepadanya.

### Bagian Kempat

#### Fungsi

##### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ter sebut pada pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- b. Melakukan pembinaan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok nya sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah ;
- c. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### B A B III SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Bina Program ;
  - d. Seksi Produksi dan Pemasaran ;
  - e. Seksi Kesehatan Hewan ;
  - f. Seksi Penyuluhan ;
  - g. Seksi Penyebaran dan Pengembangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh se orang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebagai 1 mana terlampir pada Peraturan Daerah ini merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

#### B A B IV

#### SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI DINAS

##### Bagian Pertama

#### SUB BAGIAN TATA USAHA

##### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan - pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan.

##### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan ;

- b. Melakukan Urusan Kepegawaian ;
- c. Melakukan Urusan Keuangan ;
- d. Melakukan Perlengkapan dan rumah tangga ;
- e. Melakukan tugas lain dalam rangka membantu Kepala Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan serta melaksanakan tugas tugas lainnya;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan urusan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan keuangan ;
- (4) Urusan Perlengkapan dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan kegiatan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Seksi Bina Program

Pasal 11

Seksi Bina Program mempunyai tugas melakukan pendataan penyusunan dan pengendalian serta mengadakan evaluasi dan pelaporan program.



Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang peternakan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan penyajian data-peternakan;
- c. Merumuskan rencana program dan proyek di bidang Peternakan ;
- d. Membina tatalaksana pelaksanaan rencana program dan proyek di bidang peternakan ;
- e. Mengikuti perkembangan dan membina pelaksanaan rencana - program dan proyek serta merumuskan saran penyesuaian.

Pasal 13

Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Data ;
- b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

Sub Seksi Data mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pencatatan dan pengumpulan data peternakan ;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan, analisa dan evaluasi data di bidang peternakan ;
- c. Menyelenggarakan penyimpanan dan penyajian data di bidang peternakan.

Pasal 15

Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan data menyusun rencana program dan proyek;



- b. Mempersiapkan dan menyusun proyek ;
- c. Merumuskan pembinaan tatalaksana dan pengendalian pelaksanaan proyek.

#### Pasal 16

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan penelaahan dan penilaian atas pelaksanaan rencana proyek di bidang peternakan ;
- b. Mempersiapkan dan menyusun perumusan saran untuk penyesuaian rencana program dan proyek di bidang peternakan ;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan laporan hasil pelaksanaan program dan proyek di bidang peternakan serta menyelenggarakan peragamaan hasil pelaksanaan tersebut.

#### Bagian Ketiga

#### Seksi Produksi dan Pemasaran

#### Pasal 17

Seksi Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas membina dan membimbing inseminasi buatan, standarisasi mutu makanan ternak, pembibitan, izin usaha peternakan, pengelolaan hasil ternak dan permodalan.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 17 pada Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan dan merumuskan rencana serta program di bidang produksi dan usaha tani ;
- b. Mengurus pembinaan dan pelaksanaan dalam penyediaan bibit ternak serta pelaksanaan inseminasi buatan;

- c. Mengurus pembinaan dan pelaksanaan dalam hal penggunaan dan penyediaan makanan ternak ;
- d. Mengurus pembinaan dan pelaksanaan dalam hal pengelolaan usaha peternakan serta pengelolaan dan pemasaran hasil peternakan;
- e. Menyelenggarakan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal permodalan usaha peternakan ;
- f. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas dalam tugasnya ;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam tugasnya.

Pasal 19

Seksi Produksi dan Pemasaran terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembibitan dan Izin Perusahaan ;
- b. Sub Seksi Makanan Ternak dan Informasi Pasar ;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Hasil Ternak dan Permodalan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pembibitan dan Izin Perusahaan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan penyelenggaraan inseminasi buatan ;
  - b. Menyiapkan pembinaan terhadap Unit Inseminasi buatan menyediakan dan menyebarluaskan Informasi di bidang perizinan perusahaan peternakan serta membina penyelenggaraan pemberian perizinan di bidang usaha peternakan ;
  - c. Menyiapkan dan menyajikan pedoman pemberian bimbingan di bidang penyelenggaraan seleksi dan standarisasi mutu ternak ;

- d. Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan hasil peternakan berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan di bidang perizinan penyebaran Bibit Ternak ;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga- tenaga penguji baik Pemerintah maupun Swasta serta terhadap penggunaan alat-pemberi tanda pengujian hasil peternakan.

(2) Sub Seksi Makanan Ternak dan Informasi Pasar mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang pengusahaan hijauan makanan ternak ;
- b. Menyiapkan dan menyediakan informasi pasar serta hasil penelaahan biaya produksi dan harga pasar hasil peternakan ;
- c. Menyelenggarakan dan membina penyelenggaraan promosi pemasaran hasil peternakan ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang pengusahaan makanan penguat;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang pengusahaan pemanfaatan hasil ikutan dan buangan dari pertanian untuk makanan ternak ;
- f. Menyelenggarakan bahan-bahan untuk perencanaan dan pengendalian serta evaluasi sarana pemasaran ;

(3) Sub Seksi Pengolahan hasil Ternak dan Permodalan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penggunaan dan pemberian bimbingan dibidang pengolahan hasil ternak potong dan hasil ikutannya ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengusahaan penyusunan program pengembangan serta menyiapkan analisa kebutuhan kredit dan permodalan ;



- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengolahan hasil ternak unggas dan hasil ikutanannya ;
- d. Membina, membimbing dan mengusahakan penyusunan program penggunaan hak tanah dan tata gunanya untuk pengembangan usaha peternakan ;
- e. Membina, membimbing dan mengusahakan penyusunan program pengadaan serta menyiapkan analisa kebutuhan Peralatan dan tenaga kerja ;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengolahan hasil ternak perah serta aneka ternak dan hasil ikutannya.

Bagian Empat

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 21

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas membina dan mengawasi penyakit dan lalu lintas hewan, membina kesehatan masyarakat dan Veteriner.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 21 pada Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan dan merumuskan rencana serta program di bidang kesehatan hewan ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan dalam hal-pengamatan penyakit hewan ;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan dalam hal pemberantasan penyakit hewan serta penanggulangan wabah penyakit hewan;

- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan dalam hal kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi kesehatan bahan makanan asal ternak, penyakit zoonosa, sanitasi lingkungan dan perlindungan hewan ;
- e. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala-Dinas dalam bidang tugasnya.

#### Pasal 23

Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
- c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ,

#### Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengamatan penyakit hewan dan pelaksanaan-penolakan penyakit hewan ;
  - b. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pengawasan lalu lintas hewan ;
  - c. Menyelenggarakan pembinaan sarana pengamatan - dan penolakan penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit - mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pencegahan pemberantasan penyakit hewan ;
  - b. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pencegahan terhadap sarana pencegahan dan pemberantasan - penyakit hewan ;

c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya penanggulangan wabah penyakit.

(3) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan bahan asal makanan ternak ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dibidang pemberantasan penyakit zoonesa ;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dibidang perlindungan hewan.

Bagian Kelima

Seksi Penyuluhan

Pasal 25

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan Penyuluhan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan dalam hal program dan penyuluhan ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan dalam hal yang penyediaan dan penggunaan sarana penyuluhan dan bahan penyuluhan ;
- c. Menyelenggarakan penyelenggaraan dan pelaksanaan dalam hal pengendalian evaluasi penyuluhan ;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang tugasnya;
- e. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;

Pasal 27



Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Latihan dan Keterampilan ;
- b. Sub Seksi Sarana Informasi ;
- c. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;

Pasal 29

(1) Sub Seksi Latihan dan Keterampilan mempunyai tugas:

- a. Mempelajari dan menentukan jenis latihan keterampilan yang akan diselenggarakan ;
- b. Mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan latihan keterampilan ;
- c. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan latihan-keterampilan.

(2) Sub Seksi Sarana Informasi mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Mempelajari dan menentukan jenis sarana informasi yang diperlukan ;
- b. Merencanakan dan mengatur pengadaan sarana informasi yang diperlukan ;
- c. Mengatur dan mengawasi penggunaan sarana informasi.

(3) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Mempelajari dan merumuskan metode penyuluhan yang akan dilaksanakan ;
- b. Mempelajari dan menentukan sistem penyuluhan yang akan dilaksanakan ;
- c. Menyenggarakan pelaksanaan penyuluhan serta mengadakan evaluasi hasil pelaksanaannya.

Bagian Keenam

Seksi Penyuluhan dan Pengembangan

Pasal 29

Seksi Penyebaran dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan difikasi penyebaran dan pengembangan penyiapan wilayah pengembangan dan pemberi dan prasarana dibidang peternakan .

#### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 29 pada Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran Dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan identifikasi penyebaran dan Pengembangan peternakan ;
- b. Melaksanakan bimbingan penyiapan wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- c. Melaksanakan bimbingan penatar penyebaran dan pengembangan Peternakan ;
- d. Melaksanakan bimbingan pengembangan ternak di wilayah baru.

#### Pasal 31

Seksi penyebaran dan pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Identifikasi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
- b. Sub Seksi Penyiapan Wilayah dan Penataan Pengembangan ;
- c. Sub Seksi Sarana dan Prasarana Penyebaran dan Pengembangan.

#### Pasal 32

(1) Sub Seksi Identifikasi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas !

- a. Melaksanakan Pembinaan indetifikasi potensi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. Melaksanakan pembinaan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- c. Melaksanakan penyebaran pola dan sistem penyebaran dan pengembangan Peternakan ;

- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pengembangan peternakan.
- (2) Sub Seksi Penyiapan Wilayah dan Penataan Pengembangan mempunyai tugas :
    - a. Mempersiapkan tata ruang peternakan dan pengembangan tani ternak ;
    - b. Menentukan jumlah dan jenis ternak diperlukan ;
    - c. Melaksanakan pembinaan pengadaan penyebaran dan pengembangan ternak ;
    - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan Peternakan.
  - (3) Sub Seksi Sarana dan Prasarana Penyebaran dan pengembangan Peternakan mempunyai tugas :
    - a. Melakukan bimbingan pengolahan lahan, perkreditan dan permodalan serta transformasi ternak ;
    - b. Melakukan analisa kebutuhan tenaga kerja dibidang peternakan.

#### Pasal 33

- (1) Perubahan tipe organisasi, penambahan dan pengurangan satuan organisasi pada Dinas Peternakan akan diatur kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan pembentukan dan penerapannya diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### B A B V

#### TATA KERJA

#### Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub - Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Para Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi pada Dinas Peternakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.



Pasal 35

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap Pimpinan satuan organisasi pada lingkungan Dinas Peternakan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap Pimpinan satuan organisasi pada lingkungan Dinas Peternakan wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan di pergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan yang lebih tinggi.

Pasal 39

Para Kepala Seksi pada Dinas Peternakan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Dinas Peternakan

Pasal 40

Kepala Dinas dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja di bidang peternakan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan satuan organisasi pada saat Dinas Peternakan wajib mengadakan rapat berkala

B A B VI

K E P E G I W A I A N

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah ;
- (3) Para Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi pada Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B VIII

P E N U T U P

Pasal 44

- (1) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 5 Juli 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN,

K e t u a ,

Cap. dtt.

Cap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR, BA

H. MOH. ARLAN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu  
Sungai Selatan,

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Kalimantan  
Selatan dengan surat Keputus  
an :

Nomor : 9  
Tanggal : 20 September 1991  
Tahun : 1991  
Seri : D  
Nomor Seri: 8

Nomor : 26 /SK-I/KUM.

Tanggal : 12 September 1991.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan.

Drs. H. Ideris Apsani.

Pembina. NIP.010 041 008.

hmd

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI  
SELATAN.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor : 3 Tahun 1991

